

BAB III

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Media Sosial (Facebook)

Media mampu menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas, pemikiran dan pandangan tertentu tentang dunia dan realitas sosialnya. Media adalah bagian dari industri budaya yang terikat dengan sistem komunikasi masyarakat yang dikelola sebagai sebuah organisasi industri yang memiliki kepentingan dan kecenderungan sendiri. Kepentingan dan kecenderungan media ditentukan oleh sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik lingkungan media tersebut menentukan konstruksi kerangka pikir, kerja, dan perilaku mengelola media dan media massa¹.

Menurut Sudibyo² dijelaskan bahwa media adalah bukan ranah yang netral di mana berbagai kepentingan dan pemaknaan dari berbagai kelompok akan mendapatkan perlakuan yang sama dan seimbang. Media justru bisa menjadi subjek yang mengkonstruksi realitas yang berdasarkan penafsiran dan definisinya sendiri untuk disebarkan pada khalayak.

Sedangkan Charlotte Ryan³ berpendapat bahwa media adalah suatu ajang perang simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan. Mereka saling mengajukan pemaknaan terhadap suatu persoalan agar

¹ Farid Hamid, dan Heri Budianto, *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 241.

² Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia: Dinamika Islam Politik Pasca-Orde Baru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 47.

³ Asep Saeful Muhtadi, *Komunikasi Politik Indonesia...* h. 47.

lebih diterima khalayak. Masing-masing pihak berusaha menonjolkan basis penafsiran, klaim, ataupun argumentasi berkenaan dengan persoalan yang diberitakan. Melalui retorika dan pelabelan, masing-masing mengukuhkan posisi dan argumentasi yang digunakannya sekaligus menegaskan bahwa pandangan di luar itu sebagai lemah dan bahkan tidak benar. Dalam konteks demokrasi, keberpihakan media seperti ini memang tidak dapat disalahkan. Kehadiran media yang sarat dengan ideologi serta nilai-nilai tertentu yang dianut dan diperjuangkan dalam pemberitaannya, juga merupakan hal yang dapat diterima.

Dewasa ini, permainan komputer muncul dalam sebuah bentuk baru, yaitu berbentuk aplikasi Facebook. Aplikasi ini seolah-olah bersaing satu sama lain untuk menjadi yang paling populer.

Facebook lahir pada tahun 2004. Situs jejaring sosial ini sampai kini masuk dalam jajaran lima besar yang paling dikenal karena memiliki banyak anggota. Memasuki tahun 2006, penggunaan Friendster dan MySpace mulai tergeser dengan adanya Facebook. Situs ini dengan corak tampilan yang lebih modern memungkinkan orang untuk berkenalan dan mengakses informasi seluas-luasnya.⁴

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang bisa menghubungkan anda dengan saudara, rekan, atau bahkan berbagi orang lain yang ada dibelahan dunia lain untuk bisa saling berkomunikasi. Dengan facebook semua hal bisa dilakukan dengan

⁴ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI*, (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), h. 22.

mudah, mulai berbagi informasi, berbagi foto, video dan hal-hal menarik lainnya.⁵

Facebook diluncurkan oleh Mark Zuckerberg bersama beberapa teman kuliahnya di Universitas Harvard, yaitu Eduardo Saverin, Andrew Mc Collum, Dustin Moskovitz dan Chris Hughes, pada 4 February 2004⁶.

Pada awalnya, Facebook hanya digunakan untuk kalangan terbatas di lingkungan kampus saja. Namun dengan cepat meluas ke wilayah Boston, Amerika Serikat, hingga mendunia, termasuk Indonesia.

Facebook memang memiliki arti tersendiri bagi warga Indonesia. Kini sejumlah data telah menempatkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah pengguna Facebook terbanyak kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Menurut data *The New York Times*, pada April 2010, negara yang memiliki pengguna Facebook terbanyak adalah Amerika Serikat, Britania Raya dan Indonesia. Pengguna Facebook Indonesia kini telah mencapai setidaknya 24 juta atau 10% dari total penduduk Indonesia.⁷

Facebook adalah sebuah jejaring sosial, maka manfaatkanlah jejaring yang ada di dalamnya. Membangun komunitas lewat Facebook juga sangat efektif, mengingat produk ini berhasil mengoleksi *database*

⁵ Facebook, Twitter, dan Plurk dalam Satu Genggaman, (Yogyakarta: Madiun MADCOMS, 2010), h. 1.

⁶ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*. . . h. 72.

⁷ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*. . . h. 72.

para penggunanya secara akurat dibandingkan *platform* media sosial lain. Fakta bahwa Facebook tidak lagi hanya sebuah situs pertemanan semakin memperpanjang usia produk yang satu ini. Para pengguna internet tidak hanya menjadikannya sebagai tempat ngobrol dan bercengkrama satu sama lain, tetapi juga untuk berjualan, menjalin relasi, membentuk satu gerakan, milis, grup, gudang foto, *event organizer*, permainan berjejaring, dan sebagainya. Dengan memaksimalkan segudang fitur yang dimiliki Facebook, pengembangan komunitas dapat dilakukan dengan mudah⁸.

B. Urgensi dan Manfaat Media Sosial

Dalam demokrasi modern, komunikasi antara aktor-aktor politik dan warga negara sulit dilakukan secara tatap muka. Media tidak lagi menjadi sarana komunikasi semata, tetapi sekaligus sebagai ruang publik untuk deliberasi politik di mana warga negara dapat berpartisipasi secara aktif, berkat kemajuan teknologi dan makin independennya ekonomi media, sehingga terbebas dari intervensi negara.

Pada prakteknya media tidak hanya mengirimkan informasi apa adanya, tetapi berpartisipasi secara aktif menyikapi realitas politik sebagai aktor politik bagi diri mereka sendiri. Media melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses politik yang dianggap perlu diketahui oleh masyarakat. Peran inilah yang diharapkan dijalankan oleh media guna memajukan demokrasi. Konsisten media menjalankan

⁸ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*. . . h. 153.

peran tersebut menjadi tolak ukur majunya demokrasi dalam suatu bangsa.

Pengalaman membuktikan relasi media dan politik bersifat interpenetratif dan saling mempengaruhi. Artinya, relasi tersebut tidak selalu bersifat koperatif, tetapi dapat juga bertentangan atau berbeda pandangan. Namun yang paling penting dalam hubungan tersebut adalah posisi media dapat independen untuk menjalankan fungsi kritiknya, atau malah menjadi alat propaganda elit politik saja. Sebab di tengah politik termediasi sekarang, elit politik pun makin menyadari pentingnya akses media untuk pencitraan diri mereka. Salah satu pandangan untuk menelaah persoalan tersebut disampaikan oleh Herman dan Chomsky⁹ lewat teori *manufacturing consent* yang menyatakan bahwa, dengan tujuan untuk mempertahankan posisi politik dan ekonomi media, media cenderung mengakomodir perspektif dominan dalam masyarakat. Singkatnya, media berada dalam posisi yang dipengaruhi, dan bukan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Sebaliknya, Robinson¹⁰ lewat teori *policy media interaction* berpandangan bahwa media berorientasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pengaruh tersebut dapat terjadi karena adanya ketidakpastian kebijakan politik dan munculnya pertentangan (*disscense*) antar elit politik dalam menyikapi suatu masalah.

⁹ Lukas S. Ispandriarno, *Media dan Politik: Sikap Pers terhadap Pemerintah Koalisi di Indonesia/Salvatore Simarmata*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 5

¹⁰ Lukas S. Ispandriarno, *Media dan Politik: Sikap...* h. 6.

Sementara menurut Wolfsfeld¹¹ yang menggagas teori *political contest* berpandangan bahwa cara terbaik untuk memahami peran media dalam proses politik adalah dengan memperhatikan persaingan terhadap akses media sebagai bagian dari upaya penguasaan politik. Proses ini melibatkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berusaha untuk menentang (*challenge*) otoritas kekuasaan dan menuntut perubahan politik. Tingkat penguasaan otoritas atas dinamika politik (*political environment*) merupakan variabel menentukan apakah media berperan secara independen atau tidak dalam proses tersebut. Artinya, pemberitaan media akan berpengaruh pada politik, jika otoritas politik kurang dapat menguasai situasi politik saat itu.

Secara umum media merupakan lembaga sosial (*social institution*). Namun pada kesempatan ini media ditempatkan sebagai lembaga politik dalam konteks *the fourth estate* seperti dicetuskan Edmund Burke. Memposisikan media sebagai lembaga politik tidak bermaksud menghapusnya sebagai lembaga sosial.

Lembaga sosial adalah posisi-posisi, peran-peran, norma, dan nilai-nilai yang kompleks pada suatu struktur sosial tertentu yang menopang pola kativitas manusia secara tetap untuk dapat mempertahankan sumber-sumber kehidupan, individu-individu, dan skturuktur sosial pada masyarakat tersebut. Secara sosiologis lembaga sosial sangat beragam. Media sebagai lembaga sosial merupakan sekumpulan organisasi dan aktivitas media beserta dengan praktek-praktek formal dan informalnya, aturan-aturan operasional serta syarat

¹¹ Lukas S. Ispandriarno, *Media dan Politik: Sikap...* h. 7.

legal di dalamnya, dan kebijakan yang ditentukan oleh masyarakat sendiri terkait dengan media tersebut¹².

Media dapat berperan mendorong warga negara untuk berpartisipasi, sebab fondasi demokrasi mensyaratkan keterlibatan aktif warga negara. Serta media juga menjadi kekuatan pengawas kekuasaan politik. Peran media ini dimaksudkan menjadi prasyarat bagi terwujudnya kebebasan politik dan terjaminnya hak-hak warga negara.

Dalam kemajuan ilmu dan teknologi, muncul media baru yang dikenal media sosial atau media interaktif melalui komputer yang disebut dengan nama *internet*, yaitu akronim dari *international connection networking*. Hal itu dapat dipahami sebagai jaringan internasional yang terhubung dari satu dengan yang lainnya. Dengan internasional, telah bermakna sebagai lintas negara yang juga dikenal dengan nama globalisasi. Dengan kata lain *internet* merupakan ciri dari era globalisasi, sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi¹³. Internet dapat memperoleh simpati masyarakat dunia secara cepat. Untuk menjangkau 60 juta orang pengguna, internet hanya memerlukan waktu 3 tahun. Keunggulan media komunikasi internet adalah mudah, cepat dan murah jangkauan dunia, tidak ada birokrasi baik secara teknis maupun non teknis, tersebar di berbagai plosok kota.¹⁴

Dalam abad ke-21 ini media sosial atau media interaktif tersebut telah terbukti efektif dalam komunikasi sosial dan komunikasi politik.

¹² Lukas S. Ispandriarno, *Media dan Politik: Sikap...* h. 93.

¹³ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), cetakan kedua, h. 173.

¹⁴ Suranto Aw, *Komunikasi Sosial Budaya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 233.

Efektivitas pesan singkat melalui telepon seluler (SMS), *twitter*, *facebook*, dan *blok* memang luar biasa. Peran strategis media sosial itu dalam komunikasi politik, telah ditunjukkan keberhasilan dan kemampuannya menggalang kekuatan dan dukungan terhadap gerakan pendemokrasi di berbagai negara seperti Tunisia (2011) dan Mesir (2011). Pada akhir abad ke-20 yang lalu beberapa negara telah mengalami gerakan politik yang didorong juga oleh media sosial itu seperti Indonesia (1998), Filipina (2001), dan Malaysia (2008).

Cikal bakal penggunaan *internet* dalam aktivitas yang berkaitan dengan politik di Indonesia tahun 1994, ketika sejumlah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mulai menggunakan komunikasi *online* untuk kegiatan advokasi spesifik mereka dan *mailing list* terbuka. Hal itu kemudian semakin berkembang menjadi sumber informasi peristiwa politik bagi 13.000 penerima di kota-kota besar. Pada pertengahan tahun 1997, telah lebih dari 20 organisasi pro-demokrasi telah memiliki situs *web* sendiri yang banyak memuat informasi tentang politik di Indonesia. Kelompok prodemokrasi itu kemudian berhasil menggalang gerakan yang menggulingkan kekuasaan Orde Baru pada tanggal 21 Mei 1998. Dalam tahun 1998 itu, penetrasi *internet* di Indonesia telah mencapai sekitar 10% penduduk atau sekitar 25 juta pengguna dari 237 juta penduduknya. Dalam 2007 partai-partai politik dan sejumlah politikus di Indonesia telah memiliki *web* sendiri, terutama untuk menghadapi pemilu tahun 2009.

Internet adalah sistem jaringan dari jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia, dan dapat disebut sebagai kolaborasi teknis antara komputer, telepon, dan televisi. Arti penting dari pengguna

internet sebagai bagian pokok dari revolusi informasi, adalah kemampuan manusia menghemat waktu dan menundukkan ruang. Ada penghematan energi dalam transportasi, karena komunikasi tidak lagi tergantung pada jarak, sehingga dunia dapat dipersatukan dalam waktu yang singkat dan terjadilah globalisasi¹⁵.

Internet telah mengubah komunikasi dengan cara yang sangat mendasar, terutama melibatkan banyak interaktivitas antara komunikator dengan pengguna. Melalui *internet*, kegiatan komunikasi politik dapat terlaksana dengan menyertakan jutaan orang di seluruh dunia, tanpa adanya hubungan yang bersifat pribadi. Jika *internet* digunakan untuk komunikasi politik, maka penerima komunikasi politik yang dapat tercipta oleh *internet* tersebut sangat khas, yaitu jutaan individu yang terhubung oleh jaringan komputer, yang disebut sebagai dunia maya (*cyberspace*).

Dunia maya adalah realitas yang terhubung secara global, didukung komputer, berakses komputer, multi dimensi, artifisial, atau virtual. Dalam realitas ini, dimana setiap komputer merupakan sebuah jendela, terlihat atau terdengar objek-objek yang bukan bersifat fisik dan bukan representasi objek fisik, namun lebih merupakan gaya, karakter, dan aksi pembuatan data, dan pembuatan informasi murni¹⁶.

Istilah dunia maya mengacu kepada dunia metaforis dengan menggunakan banyak bentuk komunikasi elektronik, yang dipakai di dunia *internet*. Dunia maya menawarkan kesempatan membentuk komunitas yang sebenarnya, dimana orang yang memiliki ketertarikan

¹⁵ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 173.

¹⁶ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 174.

yang sama dan dipertemukan oleh elektronik. Media elektronik baru ini telah membuat perubahan besar dalam masyarakat dengan segala dampak positif dan negatifnya.

Dunia maya itu kemudian melahirkan sebuah masyarakat baru yang disebut masyarakat maya (*cyberspace community*) atau masyarakat internet (*internet community*). Warga masyarakat baru itu tersebar di seluruh dunia dan setiap hari bertambah sekitar 5000 orang, sangat bebas melakukan diskusi dan tukar menukar informasi secara interaktif. Itulah sebabnya *internet* dinamakan sebagai media interaktif, karena setiap orang bisa mengakses (mengunduh) pesan melalui *internet* tanpa hambatan dan tanpa mengenal batas negara dan tanpa dapat dikontrol oleh negara.¹⁷

Dengan terus bermunculannya situs-situs media sosial, secara garis besar media sosial bisa dikatakan sebagai sebuah media *online*, di mana para penggunanya (*user*) melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan yang sulit dipisahkan serta mendorong pada hal-hal baru. Saat ini media sosial yang paling banyak digunakan dan tumbuh pesat berupa jejaring sosial, blog dan wiki.

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon.

¹⁷ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 174-175.

Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan¹⁸.

Salah satu unsur mendasar yang ada pada situs-situs media sosial tersebut adalah fungsi dan layanan jejaring sosial. Layanan jejaring sosial memberikan jasa konektivitas melalui situs, *platform* dan sarana yang berfungsi memfasilitasi pembentukan jaringan atau hubungan sosial di antara beragam orang yang mempunyai ketertarikan, minat (*interest*), kegiatan, latar belakang, maksud, kepentingan, tujuan, atau korelasi dunia nyata yang sama.

Sebuah layanan jejaring sosial biasanya terdiri atas representasi setiap penggunaanya dalam wujud profil, aktivitas, relasi sosial, dan sejumlah layanan tambahan. Layanan itu biasanya berbasis web dan penggunaanya berinteraksi melalui internet, seperti pesan instan, surat elektronik dan mengunduh foto, gambar atau video.

Berbagai situs jejaring sosial memudahkan pengguna untuk berbagi ide, saran, pandangan, aktivitas, informasi, acara, ajakan dan ketertarikan di dalam jaringan individu masing-masing orang. Selain layanan jejaring sosial bersifat terpusat pada individu, sosok atau tokoh, berkembang pula layanan komunitas yang sifatnya lebih terpusat pada grup atau kelompok bersama.

¹⁸ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*. . . h. 25.

Tidak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

Pengguna media sosial bahkan bisa aktif, mengambil peran dan independen dalam menentukan konten-konten dalam media sosial kapanpun dan dimana pun. *User* media sosial bebas untuk mengedit seperti mengurangi dan menambahkan, menyebarkan, serta memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, maupun berbagai bentuk konten yang lain.

Pada tahun 2012 pengguna facebook mencapai 1 miliar dan pada tahun 2014 mencapai 1,2 miliar pengguna¹⁹. Media sosial memberi dampak besar pada kemajuan politik, reformasi dan iklim yang lebih baik pada demokrasi dibanyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Sejumlah revolusi politik yang diikuti dengan pergantian kekuasaan ke arah yang lebih demokratis banyak ditopang oleh masifnya penggalangan kesadaran melalui media sosial.

Ciri media sosial yang bebas dan tanpa sensor membuat situs-situs jejaring sosial dimanfaatkan oleh para aktivis politik untuk mempengaruhi dan menyusun sebuah gerakan sosial politik yang nyata. Kekuatan dahsyat dari media sosial ini pada satu sisi memberi harapan

¹⁹ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*. . . h. 28.

pencerahan (*enlightenment*), namun di sisi lain juga merupakan ancaman jika dimanfaatkan untuk berbagi, memengaruhi dan menggalang kekuatan yang sifatnya negatif, destruktif, teror dan dehumanisasi.

Karena media sosial merupakan bagian dari sistem relasi, koneksi dan komunikasi, maka kita harus menyikapinya dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi yang terkandung dalam teori relasi, koneksi dan komunikasi masyarakat. Berikut ini sikap yang harus kita kembangkan terkait dengan peran, manfaat dan fungsi media sosial:

1. Sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, keyakinan, tradisi dan tendensi. Oleh karena itu, benar jika dalam arti positif, media sosial adalah sebuah ensiklopedi global yang tumbuh dengan cepat. Dalam konteks ini, pengguna media sosial perlu sekali membekali diri dengan kekritisian, pisau analisa yang tajam, perenungan yang mendalam, kebijaksanaan dalam penggunaan dan emosi yang terkontrol.
2. Sarana dokumentasi, administrasi dan integrasi. Berbagai aplikasi media sosial pada dasarnya merupakan gudang dan dokumentasi beragam konten, dari yang berupa profil, informasi, reportase kejadian, rekaman peristiwa, sampai pada

hasil riset kajian. Dalam konteks ini, organisasi, lembaga dan perorangan dapat memanfaatkannya dengan cara membentuk kebijakan penggunaan media sosial dan pelatihannya bagi segenap karyawan, dalam rangka memaksimalkan fungsi media sosial sesuai dengan target-target yang telah dicanangkan. Beberapa hal yang bisa dilakukan dengan media sosial, antara lain membuat blog organisasi, mengintegrasikan berbagai lini di perusahaan, menyebarkan konten yang relevan sesuai target di masyarakat, atau memanfaatkan media sosial sesuai kepentingan, visi, misi, tujuan, efisiensi dan efektifitas operasional organisasi.

3. Sarana perencanaan, strategi dan manajemen. Akan diarahkan dan dibawa kemana media sosial, merupakan domain dari penggunaannya. Oleh sebab itu, media sosial di tangan para pakar manajemen dan *marketing* dapat menjadi senjata yang dahsyat untuk melancarkan perencanaan dan strateginya. Misalnya saja untuk melakukan promosi, menggaet pelanggan setia, menghimpun loyalitas *customer*, menjajaki market, mendidik publik, sampai menghimpun respons masyarakat.
4. Sarana kontrol, evaluasi dan pengukuran. Media sosial berfaedah untuk melakukan kontrol organisasi dan juga mengevaluasi berbagai perencanaan dan strategi yang telah dilakukan. Ingat, respons publik dan pasar menjadi alat ukur, kalibrasi dan parameter untuk evaluasi. Sejauh mana masyarakat memahami suatu isu atau persoalan, bagaimana prosedur-prosedur ditaati atau dilanggar publik, dan seperti apa keinginan dari masyarakat, akan bisa dilihat langsung melalui

media sosial. Pergerakan keinginan, ekspektasi, tendensi, opsi dan posisi pemahaman publik akan dapat terekam dengan baik di dalam media sosial. Oleh sebab itu, media sosial juga dapat digunakan sebagai sarana preventif yang ampuh dalam memblok atau memengaruhi pemahaman publik.

Jumlah pelaku media sosial memang makin meningkat dari tahun ke tahun. Bagi para *netter* dan pelaku media sosial, aktivitas menyebar informasi sosial ini tidak sekadar iseng belaka. Banyak penelitian yang mengungkapkan media sosial telah menjadi jembatan untuk membina reputasi, membangun karier, menguak peluang hingga mendatangkan penghasilan.

Betapa tidak, berbagai survei telah menunjukkan banyak urusan bisnis kini telah menggunakan Facebook. Kurikulum sejumlah universitas ternama juga telah menggunakan banyak aplikasi media sosial dalam sistem belajar-mengajar untuk menyiapkan anak didik menjadi pelaku media sosial yang handal.

Dengan makin merebak dan berpengaruhnya peran media sosial dalam kehidupan sosial para *netter*, banyak juga peneliti media sosial yang mengungkapkan adanya kesan ketagihan dalam media sosial.²⁰

Facebook sudah menjelma menjadi tempat bermain, berkumpul, berbincang-bincang, bercengkerama atau sekadar melepas kangen dengan saudara, teman dan orang-orang terdekat lainnya.

²⁰ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*. . . h. 59.

Dalam rangka ikut menyebarkan informasi secara cepat dan membangun komunikasi dua arah dengan khalayak sasaran, pemangku kepentingan dan masyarakat umum, Kementerian Perdagangan (Kemendag), sejak beberapa tahun terakhir, sudah terhubung ke beberapa akun media sosial khususnya Facebook dan Twitter, dua *platform* media sosial berbasis jejaring sosial *online* yang memiliki populasi pengguna terbesar di Indonesia²¹.

C. Pengertian Partisipasi Politik

Istilah partisipasi diambil dari bahasa Inggris yaitu *participation* yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu²².

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum²³.

Dengan artian partisipasi politik adalah segala bentuk dukungan terhadap perjalanan politik, baik kegiatan yang bersifat secara langsung

²¹ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi*. . . h. 134.

²² P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 93.

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), h. 149.

maupun tidak. Dari pengertian tersebut partisipasi dapat dijelaskan secara umum merupakan aktivis individu suatu anggota masyarakat atau sekelompok orang untuk berperan secara aktif dalam membangun komunitas politik, melalui cara memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemimpin yang telah dipilih.²⁴

Aktivitas manusia politik di gelanggang politik, pada dasarnya merupakan tindakan politik atau partisipasi politik yang dikembangkan melalui pengalaman atau aplikasi sosialisasi politik. Menurut Miriam Budiardjo²⁵ partisipasi politik dijelaskan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Pakar ilmu politik, Huntington dan Nelson²⁶ memandang bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, dengan maksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal dan efektif atau tidak efektif. Partisipasi politik mencakup banyak aspek, termasuk keterlibatan yang tidak sukarela. Dalam hal ini Huntington dan Nelson membedakan antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan

²⁴ Dedi Kurnia Syah Putra, *Media dan Politik: Menemukan Relasi antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media dan Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 46.

²⁵ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 210.

²⁶ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 211.

partisipasi yang dimobilisasi atau digerakan oleh pihak lain (*mobilized participation*).

Perspektif dan pendapat dari pakar ilmu politik itu tentu berbeda dengan perspektif dan pandangan para pengkaji komunikasi politik. Berdasarkan paradigma mekanistik, partisipasi itu tidak lain dari reaksi khalayak politik sebagai salah satu bentuk efek politik dari komunikasi politik sebagaimana telah dijelaskan. Sedangkan berdasarkan paradigma pragmatis, partisipasi politik itu dapat dipandang sebagai tindakan politik yang dapat diamati polanya untuk dibuat prediksi ke masa depan. Berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam politik dikaji dalam paradigma psikologis, karena setiap individu khalayak memiliki filter konseptual, yang berfungsi menyerap atau menolak kampanye politik atau pemasaran politik yang merangsangnya.

Dalam kenyataannya tindakan politik warga negara itu memang selalu bergerak dari tidak terlibat sama sekali, terlibat secara terbatas sampai dengan terlibat secara penuh dalam kegiatan politik. Mereka yang tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik dalam arti sikap masa bodoh atau apati (*apathy*) dapat disebabkan Karena: (1) sikap acuh tak acuh; (2) tidak tertarik pada politik; (3) kurang mengerti masalah politik; (4) tidak yakin bahwa usaha dalam mempengaruhi kebijakan publik akan berhasil. Meskipun demikian apati (*apathy*) itu selain dapat diartikan negatif, juga dapat memberikan arti positif. Mc Closky²⁷ menyatakan bahwa sikap masa bodoh atau apati itu berguna dalam memberikan fleksibilitas kepada sistem politik, karena semua warga negara itu aktif dalam kegiatan politik, justru dapat

²⁷ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 211.

menimbulkan pertikaian, fragmentasi, dan stabilitas sebagai konsekuensi ketidakpuasan politik.

Menurut I.L. Pasaribu dan B. Simanjuntak²⁸, yang membuat rumusan pengertian partisipasi dengan meninjau beberapa dimensi, bahwa partisipasi dapat juga dalam bentuk buah pikiran yang diberikan dalam bentuk pertemuan dan sebagainya. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga seperti misalnya kegiatan yang diberikan untuk perbaikan salah satu pembangunan di desa, dan sebagainya. Demikian juga, partisipasi dapat juga dilihat dari keikutsertaan seseorang memberikan harta benda, partisipasi baik itu dalam bentuk keterampilan dan kemahiran dan yang terakhir adalah berkaitan erat dengan partisipasi dalam bentuk partisipasi sosial terlihat seperti bentuk koperasi, paguyuban, gotong-royong, dan sebagainya yang sejenis dengan itu.

Tommi Legowo²⁹ merumuskan pengertian partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dari warga negara yang secara sengaja maupun dengan tidak secara sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintah. Dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun illegal sifatnya.

Partisipasi politik terkait dengan proses perumusan kebijakan negara. Ini suatu definisi yang sangat umum dan definisi ini sangat gampang bisa diterima, karena partisipasi memberikan gambaran tentang keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.

²⁸ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*,, h. 93.

²⁹ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*,, h. 93.

Akan tetapi, ketika berusaha untuk memperinci pengertian daripada kegiatan politik maka disinilah akan mulai menemukan kesukaran-kesukaran di dalam memahami konsep partisipasi politik.

Pertama dilihat dari pengertian keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik. Kegiatan-kegiatan politik bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: *pertama*, kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau pemerintah. *Kedua*, kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah. Jadi, ketika melihat pada hal ini maka timbul perbedaan-perbedaan pandangan di kalangan para ilmuwan politik. Perbedaan pandangan melibatkan persoalan apakah partisipasi politik itu hanya meliputi kegiatan atau keikutsertaan masyarakat di dalam mendukung sistem politik atau mendukung pemerintah, ataukah juga meliputi keikutsertaan masyarakat di dalam menggugat pemerintah.

Proses bagaimana masyarakat mengajukan *input* ke dalam sistem politik dengan hal ini akan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai konsep partisipasi politik dan meletakkan kedudukan konsep partisipasi politik di dalam tempat yang wajar. Menurut David Easton³⁰ bahwa masyarakat atau anggota-anggota masyarakat ataupun anggota-anggota sistem politik yang lain memasukkan *input* kepada pemerintah atau sistem politik. Input-input itu diajukan sebagai cara untuk mempengaruhi *output* yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah. Input-input yang masuk ke dalam

³⁰ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*,, h. 94.

sistem politik merupakan pencerminan daripada kepentingan-kepentingan yang ada di dalam sistem politik itu atau kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat yang ada di dalam sistem politik itu.

Maka dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kepentingan-kepentingan masyarakat itu mempunyai dua bentuk. *Pertama*, kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan (*supports*) kepada sistem politik atau pemerintah. *Kedua*, kepentingan-kepentingan yang bersifat gugatan atau tuntutan (*demands*) terhadap sistem politik atau terhadap pemerintah. Kepentingan-kepentingan yang memberikan dukungan terhadap sistem politik, mempunyai arti bahwa masyarakat dapat menerima *output* yang dihasilkan oleh sistem politik, yang berupa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, terutama apabila anggota-anggota masyarakat di lingkungan sistem politik itu dapat menerima *output* yang dihasilkan oleh sistem politik maka hal itu dapat berarti, ada semacam keselarasan antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Karena masyarakat merasa mempunyai kepentingan yang sama dengan pemerintah maka masyarakat memberikan dukungan kepada sistem politik atau kepada pemerintah.

Namun sebaliknya, kepentingan masyarakat bisa juga tercermin dalam ketidaksamaan kepentingan antara masyarakat dan kepentingan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat merasakan bahwa *output* yang dihasilkan oleh sistem politik tidak sejalan atau tidak selaras dengan kepentingan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa menerima

output itu. Apabila situasi ini yang timbul dalam sistem politik maka masyarakat tidak akan mendukung sistem politik.

Maka jika dilihat dari sudut ini studi partisipasi politik mengalami perkembangan yang sangat pesat di bawah pendekatan tingkah laku. Dalam perkembangan partisipasi politik telah terjadi demokratisasi dalam studi ilmu politik pada era pendekatan tingkah laku dalam artian bahwa suara rakyat mendapat tempat yang paling penting dalam kajian-kajian politik.

Menurut Gabriel A Almond dan David Easton, dapat dipahami bahwa alasan yang bermacam-macam bagi perlunya partisipasi politik yang dijalankan oleh warganegara. Partisipasi politik menurut pandangan Gabriel A Almond dan David Easton³¹ adalah kewajiban setiap warganegara sebab keputusan yang dihasilkan oleh penguasa politik harus dipatuhi oleh setiap orang dan orang tersebut harus menyampaikan kepentingan-kepentingan dan aspirasinya sehingga dapat diperhatikan oleh orang yang membuat keputusan. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa setiap aspirasi atau kepentingan yang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik akan dipenuhi dan diperhatikan oleh keputusan yang dikeluarkan.

Teori partisipasi politik dari perspektif Barat, adalah bahwa teori partisipasi politik tersebut hanya mengkaji kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat. Dalam hal ini ilmuan politik yang beraliran perilaku (*behavioralist*) melihat interaksi masyarakat di satu sisi dan penguasa politik (*decision maker*) di sisi lainnya. Sebagai

³¹ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*,, h. 96.

objek utama dalam kajian Ilmu Politik, bagi pandangan ini bahwa masyarakat memainkan peranan penting dalam menentukan dalam proses pembuatan keputusan politik. Oleh sebab itu, pandangan yang seperti itu lebih cenderung pada pemikiran atau prinsip dasar dalam paham demokrasi. Aliran pemikiran perilaku (*behavioralist*) yang menganggap bahwa kegiatan-kegiatan politik yang dijalankan oleh warganegara masyarakat (partisipasi politik) memainkan peranan penting di dalam sistem politik dan dapat dikatakan menjadikannya partisipasi politik dan tingginya tingkat perhatian penguasa politik terhadap partisipasi *input* sebagai tolak ukur normatif bagi suatu sistem politik. Maka dengan demikian, pusat perhatian daripada teori partisipasi politik itu adalah pada kegiatan politik rakyat bisa dipengaruhi oleh penghargaan yang tinggi terhadap paham demokrasi pada khususnya.³²

Samuel P. Huntington dan Nelson³³ mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah salah satu saja bentuk dari kegiatan politik yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat itu dalam kedudukannya sebagai rakyat biasa disebut dengan partisipasi politik. Akan tetapi kegiatan politik yang dijalankan oleh para penguasa politik (mereka sebagai warganegara) dalam kedudukan mereka sebagai pengambil keputusan politik tidak dapat dikatakan atau dinamakan sebagai partisipasi politik. Kegiatan tersebut hanya dapat disebut sebagai kegiatan politik saja. Namun partisipasi politik tidak lebih cenderung kepada sasaran yang dituju yakni proses pembuatan keputusan politik. Partisipasi bertujuan untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan

³² P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, , h. 96.

³³ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*, , h. 97.

diambil agar keputusan tersebut dapat menguntungkan atau paling tidak, tidak merugikan. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh penguasa politik dalam kedudukannya sebagai pembuat dan pengambil keputusan politik jelas itu adalah merupakan kegiatan politik. Para pembuat keputusan yang menghasilkan keputusan politik dan menjalankan kegiatan politik dalam bentuk turut serta memberikan masukan untuk akhirnya menentukan masukan mana yang akan dijadikan sebagai keputusan politik.

Terlepas dari menguntungkan atau tidak menguntungkan, partisipasi politik masyarakat seperti itu, teori partisipasi yang dikembangkan yang lebih banyak memberikan perhatian pada partisipasi politik yang konvensional dan nonkonvensional sebagaimana dapat dilihat dalam kehidupan politik Indonesia semenjak akhir tahun 1980-an yang mengalami sejumlah pergeseran yang signifikan.

Dalam terminologi ilmu politik, bahwa unjuk rasa adalah merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam hubungan ini Gabriel A Almond³⁴ sebagai salah pengagas pendekatan perilaku sekaligus sistem politik, dalam ilmu politik mengkategorikan unjuk rasa sebagai bentuk partisipasi politik nonkonvensional. Almond membedakan dengan partisipasi politik konvensional, seperti memberikan suara pada pemilihan umum, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan berkomunikasi secara individual dengan pejabat politik dan administratif.

³⁴ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*,, h. 97.

D. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Sebagaimana yang telah dikonsepsikan di atas, maka selanjutnya akan mengulas berbagai bentuk partisipasi masyarakat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Apa yang diartikan dengan bentuk-bentuk kegiatan politik di sini adalah mengikuti konsep kepentingan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut, tentunya meliputi kegiatan-kegiatan politik yang bersifat mendukung (*support*) atau menggugat (*demands*) atau menuntut, sebagai *input* yang diajukan masyarakat terhadap sistem politiknya.

Kegiatan-kegiatan politik atau bentuk partisipasi politik yang berupa dukungan terhadap sistem politik atau pemerintah. Dalam hubungan ini, kita dapat merumuskan segala kegiatan politik yang sifatnya memberikan dukungan kepada sistem politik atau pemerintah. Kegiatan seperti itu tampak dengan jelas dalam dukungan yang diberikan masyarakat untuk ikutserta dalam kegiatan pemilihan umum yang dianjurkan oleh pemerintah.

Dalam bentuk penyajian partisipasi politik senantiasa tergantung kepada tipe-tipe sistem politik yang dianut. Oleh karena itu jika hal ini dilihat dari perspektif negara-negara demokratis maka pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik kedaulatan rakyat. Kegiatan politik yang tercakup di dalam partisipasi politik memiliki variasi bentuk dan intensitas. Dan biasanya, perbedaan-perbedaan jenis partisipasi politik dilihat di dalam aspek frekuensi dan intensitas. Maka dengan berdasarkan hal itu, pengamatan, jumlah individu yang ikutserta dalam kegiatan yang tidak intensif (kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan tanpa berdasarkan praksa-praksa sendiri,

seperti memberikan suara dalam pemilihan umum) ini sangat besar sekali. Dan sebaliknya, jika orang atau sejumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik sebagai aktivitas politik, menjadi pimpinan dari partai politik akan sangat kecil.

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff³⁵ dari berbagai bentuk atau formulasi partisipasi politik, berkaitan erat dengan sistem politik, yang dianut, betapapun juga dianggap perlu untuk menempatkan posisi pemberi suara dalam pemilihan umum, keikutsertaan dalam kegiatan kampanye, ikutserta dalam kegiatan-kegiatan rapat umum yang berkenaan dengan kegiatan politik dan bertujuan untuk melihat apakah ada hubungan hirarkhis antara peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala tadi itu. Dan semua ini terlihat di dalam luas jangkauannya partisipasi.

Partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik. Mereka itu disebut partisipan politik, yaitu pengikut politik atentif atau yang berminat dan ikut dalam kegiatan politik. Selain itu terdapat juga pengikut politik yang acuh tak acuh. Baik partisipan politik sebagai peserta politik yang atentif maupun peserta politik yang acuh atau tak acuh merupakan hal khalayak politik, dalam paradigma mekanistik.

Nimmo³⁶ menyatakan bahwa partisipan politik adalah “khalayak politik” yang acuh tak acuh, melainkan aktif bukan saja memperhatikan pesan politik dari para komunikator politik atau politikus, tetapi juga menanggapi dan melakukan dialog dengan para

³⁵ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*,, h. 100.

³⁶ P. Anthonius Sitepu, *Teori-Teori Politik*,, h. 100.

politikus itu. Bahkan partisipan politik bekerjasama dan bersama dengan komunikator politik atau politikus, sehingga berperan juga sebagai komunikator politik. Partisipasi politik dalam perspektif komunikasi politik, dilaksanakan oleh partisipan politik.

Partisipasi politik menurut James Rosenau³⁷ terdiri atas dua bentuk. *Pertama*, para pengamat yang memperhatikan politik yang tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum yang lain. Mereka pada umumnya khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio, dan pemirsa televisi), serta aktif dalam diskusi, seminar dan memberika komentar melalui media massa. *Kedua*, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan komunikasi dengan para pemimpin politik atau politikus, baik dipemerintahan maupun diparlemen dan diluar parlemen.

Sejalan dengan pendapat Rosenau tersebut, Anwar Rifin³⁸ membagi partisipasi politik dalam dua bentuk, yaitu: partisipan pengamat dan partisipan mitra. Berdasarkan pengalamannya di lapangan dijelaskan bahwa pada umumnya partisipan pengamat adalah kalangan akademisi yang memiliki minat, pengetahuan dan kompetensi, serta rajin mengikuti perkembangan politik secara kritis. Sedangkan partisipan mitra pada umumnya adalah aktivis atau orang-orang yang ingin menjadi aktivis sehingga melibatkan diri dalam kegiatan politik sebagai mitra politikus. Mereka juga khalayak media

³⁷ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 213.

³⁸ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 213.

massa, yang aktif dalam politik praktis, karena mungkin diberi tugas dan fungsi sebagai tim sukses oleh politikus.

Huntington dan Nelson³⁹ membedakan bentuk partisipasi antara partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi atau digerakkan oleh pihak lain (*mobilized participation*). Partisipasi yang bersifat otonom (*autonomous participation*) itu, merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara sukarela oleh warga negara yang dapat dikatakan sebagai bentuk dari efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik. Dalam hal itu warga negara yang pada umumnya berpendidikan, sadar akan hak dan kedaulatan yang dimiliki serta yakin dan percaya bahwa keterlibatannya dalam berbagai kegiatan politik memiliki manfaat dan efek politik (*political efficacy*).

Sebaliknya partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*) adalah bentuk partisipasi politik yang tidak sukarela, tetapi digerakkan oleh partai politik, kandidat, tim sukses atau pejabat pemerintah. Dalam hal itu, warga negara yang pada umumnya kurang berpendidikan belum menyadari tentang hak dan kedaulatan yang dimilikinya, sehingga perlu digerakkan. Hal itu dapat berbentuk intimidasi atau berbentuk politik uang (*money politics*), sebagaimana yang terjadi diberbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Partisipasi politik yang dimobilisasi itu, dapat juga dikatakan sebagai akibat dari tidak efektifnya sosialisasi politik dan komunikasi politik persuasif dan edukatif dari partai politik atau pemerintah.

³⁹ Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Filsafat...* h. 213.

Selain itu, Huntington dan Nelson juga menyebutkan bahwa selain partisipasi positif yang telah dijelaskan, terdapat juga partisipasi yang bersifat negatif, seperti melakukan demonstrasi, terror politik dan pembunuhan politik. Hal itu dapat dimasukkan dalam kelompok khalayak kepala batu dalam komunikasi politik yang tidak efektif. Khalayak kepala batu yang lain dalam komunikasi politik, ialah orang-orang yang disebut apati (*apathy*) yaitu warga negara yang tidak sama sekali tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan politik, karena berbagai macam sebab.

Suatu bentuk partisipasi politik adalah bentuk diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga, di tempat kerja atau di antara sahabat-sahabat. Diskusi semacam itu bervariasi baik di antara individu maupun dalam relasinya dengan peristiwa diskusi tadi. Mungkin terdapat lebih banyak diskusi selama kampanye pemilihan, atau pada waktu-waktu krisis politik, sedangkan diskusi dapat dirintangi atau didorong oleh sikap kekeluargaan, teman kerja atau sahabat.

Kedua kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana⁴⁰.

⁴⁰ Michael Rush Philip Althof, *Pengantar Sosiologi Politik* Penterjemah Kartini Kartono, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 127.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi lima di antaranya, yaitu⁴¹:

- 1) Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
- 2) *Lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
- 3) Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
- 4) *Contacting*, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
- 5) Tindakan kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hura, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Kelima bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson telah menjadi bentuk klasik dalam studi partisipasi politik. Keduanya tidak membedakan apakah tindakan individu atau kelompok di tiap bentuk partisipasi politik legal atau illegal. Sebab itu,

⁴¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi, dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 71.

penyuapan, ancaman, pemerasan, dan sejenisnya di tiap bentuk partisipasi politik adalah masuk ke dalam kajian ini

E. Tingkat Partisipasi Pemilih

Meskipun pilkada langsung memicu dinamika politik daerah, namun tidak serta merta membangkitkan harapan (*hope*) masyarakat. Tingginya angka absensi dalam pilkada langsung disebabkan sekurang-kurangnya tiga faktor (1) ketidakpercayaan terhadap para kandidat; (2) kejenuhan terhadap hiruk piluk politik; dan (3) kurangnya sosialisasi.⁴²

Ketidakpercayaan terhadap para kandidat merupakan faktor utama. Berbagai macam panggung politik pada setiap pemilu legislatif dan pemilu Presiden merupakan preseden yang menjatuhkan kepercayaan para politisi. Merosotnya kepercayaan itu terlihat dari rendahnya partisipasi pemilih pilkada di daerah perkotaan. Artinya, fenomena absensi pilkada langsung dekat dengan pemilih kelompok kelas menengah, yang dikenal kritis dan memiliki akses informasi yang baik.

Faktor kedua adalah kejenuhan atau kebosanan warga terhadap proses politik. Pilkada tidak otomatis membawa harapan (*hope*) kendati disadari kebijakan-kebijakan kepala daerah berpengaruh langsung terhadap kehidupan warga. Kejenuhan itu diindikasikan oleh banyaknya *incumbent* dan birokrat/pejabat yang menjadi kepala daerah terpilih.

⁴² Suharizal, *Pemilukada: Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cetakan kedua, h. 117.

Berdasarkan tingkat analisis tingkat partisipasi pilkada, masih banyak pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya baik karena tidak terdaftar maupun yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilih (golput). Persoalan pertama, pemilih yang tidak terdaftar, merupakan persoalan teknis administratif. Sementara persoalan kedua, pemilih yang golput, merupakan fenomena *protest voters* terhadap proses dan hasil pilkada. Beberapa penelitian menampilkan bahwa hilangnya hak pilih juga terjadi karena kelemahan atau kesalahan penyelenggaraan pilkada.

Tingginya tingkat absensi menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih berimplikasi pada dua gejala menarik. *Pertama*, pemilih cenderung menentukan pilihan pada calon yang sudah dikenal atau calon yang sudah menjabat sebelumnya (*incumbent*).

Tingginya angka absensi atau rendahnya partisipasi pemilih tidak membatalkan penetapan kepala daerah terpilih. Selama perolehan suara di atas 25% suara sah (menurut UU No. 32 Tahun 2004), calon tetap dapat dilantik menjadi kepala daerah terpilih. karena pilkada menggunakan legitimasi formal, di mana kemenangan di hitung berdasarkan kehadiran pemilih di TPS. Postulat itu merupakan implikasi prinsip sukarela dalam memilih (*voluntary voting*).

Tingginya angka absensi bisa diartikan sebagai minimnya legitimasi sehingga kedudukan dan kepemimpinan kepala daerah kurang dipercaya rakyat. Jika DPRD menjalankan fungsinya dengan baik (bidang pengawasan, anggaran dan legislasi), minimnya legislasi

acap kali menimbulkan tarik menarik antara kepala daerah dan mayoritas kursi DPRD.

Menurut Sjachran Basah⁴³ mengatakan bahwa keterlibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan mutlak dari demokrasi, yang juga berarti rakyat ikut berperan serta melakukan pengawasan terhadap pemerintahan. Kesahan atau legitimasi suatu pemerintahan dalam perspektif demokrasi dapat dilihat sampai seberapa besar partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Tingginya tingkat partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan itu. Jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan kekuasaan politik yang absah.

Ada beberapa penyebab yang memungkinkan rendahnya jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada langsung, di antaranya⁴⁴:

Pertama, kejenuhan masyarakat mengikuti pemilu. Sebelum pilkada, masyarakat telah memilih dalam dua kali pemilu, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden sebanyak dua putaran. Kejenuhan ini masyarakat enggan kembali ke TPS, dikarenakan beberapa sebab, misalnya apatis terhadap para calon, ketidakpedulian terhadap siapapun calon yang menang, serta lebih memanfaatkan waktu libur saat hari pencoblosan untuk rekreasi, wisata, atau pulang kampung.

Kedua, tidak akuratnya data pemilih. Pemutakhiran data pemilih yang tidak akurat menyebabkan sejumlah masyarakat tidak menerima

⁴³ Suharizal, *Pemilukada: Regulasi...* h. 117.

⁴⁴ Iwan K. Hamdan, *Berhala Pilkada*, Center for Information of Regional Development (Cired-Net), h. 16.

kartu pemilih. Hal ini disebabkan karena alokasi waktu yang sangat sempit.

Ketiga, minimnya sosialisasi tentang pilkada yang dilakukan KPUD, menyebabkan rendahnya paparan informasi di masyarakat tentang pelaksanaan pilkada. Selain jadwal sosialisasi yang singkat, KPUD dianggap kurang memanfaatkan berbagai sarana atau media yang dapat menyentuh lapisan masyarakat secara lebih efektif dan efisien.